

# SOSIALISASI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEMBENTUK PEMILIH CERDAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017

**Dindin Herdian**

Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung  
*din2din.dh@gmail.com*

**Samugyo Ibnu Redjo**

Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung

**Yusa Djuyandi**

Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung

## ABSTRACT

*This study analyzes about political socialization by KPU Provinsi DKI Jakarta in forming smart voters in the DKI Jakarta governor election in 2017. This was motivated by the low level of voter participation in 2007 and 2012 and the existence of SARA issues which led to the actions of Muslims. The theory used in this study is the Theory of Rush and Althoff where there are 3 methods of political socialization, namely imitation, instruction and motivation. The method in this study is a qualitative method. The results of this study are political socialization by the KPU Provinsi DKI Jakarta in forming smart voters carried out by imitation method, instruction and motivation. Imitation is done to the beginner voter by way of face-to-face socialization, election camp and choir competition. Instructions were made to the segment of people with disabilities by way of face-to-face and public debate socialization to the first 3 rounds. Motivation was carried out on segments of religious groups, women's groups, suburban groups and professional groups by way of face-to-face socialization, public debates to the first 3 rounds and second round public debates.*

**Key Word:** *Political Socialization, Smart Voters, KPU Provinsi DKI Jakarta*

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpin negara dalam periode tertentu. Pemilihan umum juga merupakan sarana untuk melahirkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Budiardjo menyebutkan bahwa legitimasi (keabsahan)

adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Dalam hal ini, legitimasi kekuasaan menunjukkan adanya keyakinan dan penghormatan anggota-anggota masyarakat terhadap pemimpin yang telah terpilih melalui pemilihan umum.<sup>1</sup>

Pemilihan kepala daerah serentak secara nasional di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2015 untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2015 ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia sehingga menjadi momen penting dan bersejarah bagi Indonesia untuk memilih kepala daerah secara masif yang terorganisir dan terstruktur. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama ini telah digelar secara serentak pada Tanggal 9 Desember 2015. Terdapat 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 terdiri atas 9 Provinsi, 36 Kota dan 224 Kabupaten.<sup>2</sup> Selanjutnya pada tahun 2017, terdapat 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota atau total 101 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak.

Dari beberapaprovinci yang mengadakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, konsentrasi publik begitu besar terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan Jakarta merupakan otoritas politik. Dimana Jakarta merupakan *Central of Power and Politics*. Selain itu, gencarnya pemberitaan mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 menjadikan pemilihan tersebut mendapat perhatian yang besar dari publik. Media cetak dan elektronik banyak memberitakan mengenai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Apalagi perhatian publik

---

1. Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h 64

2. [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/PETA\\_AMJ.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/PETA_AMJ.pdf)

semakin besar pada saat debat kandidat resmi yang disiarkan langsung pada stasiun televisi.

Dalam sejarahnya, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 adalah Pemilihan yang ketiga secara langsung dipilih oleh warga DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat. Untuk yang pertama, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung pada tahun 2007. Ada 2 pasangan calon yang berkompetisi yaitu Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto. Pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007 dengan 57,9% suara (KPU DKI, 2017).

Kedua, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung pada tanggal 11 Juli 2012. Ada enam pasangan calon yang berkompetisi yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem Triani Benjamin dan Alex Noerdin-Nono Sampono. Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dengan 42,6% suara pada putaran pertama dan 53,82% suara pada putaran kedua (KPU DKI, 2017). Adapun tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007 dan 2012 adalah:

**Tabel 1**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007 dan 2012**

Uraian	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012	
		Putaran I	Putaran II
Pemilih	5.719.285	6.962.348	6.996.951
Pengguna Hak Pilih	3.740.984	4.407.141	4.647.304
Partisipasi (%)	65,41	63,30	66,42

*Sumber: KPU DKI, 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007 sebesar 65,41 % sedangkan Tahun 2012 putaran pertama sebesar 63,30% dan putaran kedua sebesar 66,42%. Berdasarkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007 dan 2012 menunjukkan bahwa masih banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Untuk itu, partisipasi pemilih tersebut perlu untuk ditingkatkan namun tidak berhenti pada tingkat partisipasi saja. Tingkat partisipasi perlu dibarengi dengan kualitas pemilihnya.

Selanjutnya pada saat menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, timbul konflik horizontal yang berawal dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Di sana Basuki Tjahaya Purnama menggelar dialog dengan masyarakat setempat, sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Dalam kunjungan kerja tersebut Basuki Tjahaya Purnama meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil pemerintahannya jika Basuki Tjahaya Purnama tidak terpilih kembali. Namun, Basuki Tjahaya Purnama menyisipkan Surat Al Maidah ayat 51.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada hari Jumat 4 November 2016 terjadi sebuah aksi besar dari umat Muslim yang digelar di Jakarta dan di beberapa kotabesar di Indonesia. Perwakilan pedemo yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama, akhirnya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla. Aksi massatersebut berlangsung dengan damai namun setelah pukul 18.00, yang merupakan batas waktu diizinkan nya sebuah aksi berlangsung, suasana semakin memanas. Ricuh kecil terjadi. Tiga buah mobil dibakar. Pada jam-jam berikutnya, provokasi di dunia nyata dan juga di dunia maya terus dilakukan. Banyak informasi menyesatkan di dunia maya yang

---

<sup>3</sup>.<https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-panjang-kasus-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok.html>.

semakin memperkeruh suasana. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan meminta pertanggungjawaban kepada penanggung jawab aksi unjuk rasa pada Jumat 4 November 2016. Pasalnya, aksi unjuk rasa tersebut berakhir ricuh. Padahal penanggung jawab demo tersebut telah berkomitmen akan menyampaikan aspirasinya secara damai.<sup>4</sup>Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2016 digelar Aksi damai yang merupakan aksi lanjutan dari yang telah dilakukan pada tanggal 4 November 2016. Peserta aksi ingin agar proses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap terkawal. Aksi tersebut dipusatkan di Monas mulai pada pukul 08.00 WIB dan diakhiri dengan shalat Jumat berjamaah.<sup>5</sup>

Dengan adanya peristiwa-peristiwa menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi politik agar para warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan cerdas. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berdasarkan visi misi, program kerja dan *track record*. Bukan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berdasarkan suku, agama, ras dan golongan tertentu.

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang sosialisasi politik pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, Ramadhan dalam penelitiannya memfokuskan penelitian pada Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2004. Dalam upaya melakukan sosialisasi Pemilu tahun 2004, KPU menetapkan Keputusan dengan Nomor 623 tentang Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilu. KPU melakukan strategi sosialisasi *above the line* dan *below the line*, pemasangan iklan layanan

---

<sup>4</sup>.<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/05/08332041/menata.emosi.usai.aksi.damai.4.november.2016>.

<sup>5</sup>.<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/29/16532251/gnpf.mui.perkiraan.3.juta.orang.ikut.dalam.aksi.2.desember>.

masyarakat Pemilu melalui televisi, radio dan surat kabar. Adapun tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dibagi menjadi tiga tahap yaitu: Tahap I: Persiapan Pemilu, Tahap II: Pemilu Legislatif, dan Tahap III: Pemilu Presiden.<sup>6</sup>

Kedua, Zuhri dalam penelitiannya memfokuskan penelitian pada Peran Sekolah dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang). Proses sosialisasi politik di SMAN 2 Semarang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Proses sosialisasi politik secara langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik untuk lebih tertarik melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan proses sosialisasi politik tidak langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melalui pengembangan diri baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun melalui kegiatan organisasi yang berada di sekolah.<sup>7</sup>

Ketiga, Djuyandi dalam penelitiannya memfokuskan penelitian pada Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses sosialisasi politik pemilu legislatif oleh KPU yang dilakukan dengan cara mendatangi beberapa kampus, sekolah, maupun kelompok masyarakat tertentu dinilai efektif sebab mampu menekan angka golput disaat muncul kekhawatiran akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang menimpa kader partai. Hasil pemilu yang menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah sebesar 75,11 % menjadi bukti bahwa KPU telah berhasil mencapai targetnya dalam menekan angka golput, dan ini menunjukkan ada perbaikan kinerja KPU dibandingkan dengan periode pemilu sebelumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>. Ramadhan, Sahrani H. (2004). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu 2004*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

<sup>7</sup>. Zuhri, Sihabudin. (2010). *Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

<sup>8</sup>. Djuyandi, Yusa. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut dipilih karena peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif lebih tertarik pada penggambaran proses dari pada hasil akhir (*outcome*). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan, dimana pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive* untuk komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta sedangkan untuk informan relawan demokrasi menggunakan *snowball*. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Ada dua jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan jawaban pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan ke gedung KPU Provinsi DKI Jakarta Jalan Salemba Raya No. 13 Jakarta Pusat dan ke tempat relawan demokrasi dengan melakukan *depth interview* dengan model *structured* dan *unstructured interview* pada beberapa informan. Sedangkan bahan-bahan dokumen diperoleh dari dalam maupun luar KPU seperti buku-buku, undang-undang dan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan KPU.

## C. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan sasaran sosialisasi politik kepada kelompok masyarakat yang terbagi menjadi enam segmen yaitu pemilih pemula, penyandang disabilitas, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok pinggiran/marginal dan kelompok profesi. Segmen pemilih tersebut

---

<sup>9</sup>. Creswell, John W. 2016. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h 20

adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial politik di DKI Jakarta.

### **1. Imitasi**

Menurut Rush dan Althoff,<sup>10</sup> imitasi adalah peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain, dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi masa anak-anak walaupun tidak dibatasi pada tingkah laku anak-anak saja. Namun demikian, imitasi murni lebih banyak terdapat di kalangan anak-anak. Pada masa remaja dan pada orang dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi maupun motivasi. Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, imitasi erat kaitannya dengan pemilih pemula. Dimana pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Untuk itu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi politik kepada pemilih pemula sebagai berikut:

#### **a. Sosialisasi Tatap Muka**

Tujuan kegiatan sosialisasi tatap muka dengan pemilih pemula adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemilihan umum serta untuk memberikan masukan bagi pemilih pemula akan pentingnya ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya secara cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi tatap muka kepada segmen pemilih pemula berikut ini:

---

<sup>10</sup> . Rush, Michael dan Phillip A. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h 38



**Tabel 1**  
**Sosialisasi Tatap Muka kepada Segmen Pemilih Pemula**

No.	Tanggal	Tempat	Peserta
1	25 Agustus 2016	Taman Ismail Marzuki	Siswa SMA Se Wilayah DKI
2	9 September 2016	Kampus Universitas Negeri Jakarta	Bem Se Wilayah DKI Jakarta
3	20 Oktober 2016	STIP Marunda	Mahasiswa STIP Marunda
4	28 Oktober 2016	Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Islam SADRA Jakarta Selatan	Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Islam SADRA Jakarta Selatan
5	6 Februari 2017	Aula Kampus Universitas Islam Jakarta, Jakarta Timur	Mahasiswa Universitas Islam Jakarta
6	7 Februari 2017	Aula Kampus Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Timur	Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun
7	8 Februari 2017	Aula SMA PB Sudirman Cijantung Jakarta Timur	Siswa SMA PB Sudirman
8	8 Februari 2017	Aula SMKN XXXIV Jakarta Pusat	Aula SMKN XXXIV
9	9 Februari 2017	Aula SMA Yadika V Jakarta Barat	Siswa SMA Yadika V
10	9 Februari 2017	Aula SMA 51 Kramat Jati, Jakarta Timur	Siswa SMA 51
11	10 Februari 2017	Aula Mercubuana R. 206 Psikologi Jakarta Barat	Mahasiswa Mercu Buana
12	12 April 2017	Gedung UNJ Fakultas Psikologi	Mahasiswa
13	15 April 2017	Panti Asuhan Harapan Remaja Rawamangun Jakarta Timur	Pemilih Pemula

*Sumber: KPU DKI, 2018*

Sosialisasi tatap muka kepada segmen pemilih pemula dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi sekolah, kampus dan panti asuhan yang ada di Jakarta serta mengumpulkan pemilih pemula pada tempat yang telah ditentukan. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber berasal dari Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam beberapa kesempatan, dibantu juga oleh Kepala

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta. Adapun materi yang disampaikan kepada segmen pemilih pemula adalah: tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, ajakan untuk memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dan gunakan hak pilih secara cerdas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

Dalam melakukan sosialisasi tatap muka ke pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta melibatkan relawan demokrasi yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Program relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu Betty Epsilon mengatakan:

*"Sosialisasi tatap muka kami lakukan juga dengan cara melibatkan relawan demokrasi. Relawan demokrasi kami bentuk di setiap kabupaten/kota sebagai upgrade yang sudah dilakukan ketika pemilu tahun 2014. Upgrade kegiatannya itu kami tingkatkan. Waktu itu ada relawan demokrasi di setiap Kabupaten/Kota 5 orang waktu pemilu tahun 2014. Kami menyadur kegiatan yang sama tapi hampir 25 setiap Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat, proporsional terdiri dari kelompok disabilitas, dari kelompok perempuan, dari kelompok tokoh masyarakat/tokoh agama, keempat dari pemilih pemula, kelima marginal dan keenam dari kelompok profesi. Nah semuanya melakukan kegiatan secara tatap muka bedanya relawan demokrasi itu memanfaatkan momentum yang ada di masyarakat artinya kami tidak menyiapkan anggaran buat mereka. Menyiapkan kegiatan sosialisasi tapi mereka memanfaatkan momentum yang ada di masyarakat yang berasal dari 6 kelompok tadi. Jadi dari tokoh-tokoh 6 itu dan mereka memanfaatkan kegiatan yang ada di masyarakat just saying gunakan hak pilih anda. Ini loh caranya seperti itu. Relawan demokrasi itu karena misalnya saya adalah dari kelompok pemilih pemula, maksimum 25 tahun saat itu. Jadi misalnya ada acara lomba basket, jadi karena dia tokoh disitu maka dia akan punya momentum bisa berbicara di peserta lomba basket disitu. Jadi dia mengatakan, jangan lupa gunakan hak pilih anda, hak pilih teman-teman karena kita tahu bahwa pendekatan*

*peer gorup itu jauh lebih berpengaruh dibanding orang lain. Relawan demokrasi betul-betul sangat membantu."*

Peneliti telah melakukan wawancara dengan relawan demokrasi segmen pemilih pemula Jakarta Selatan, Ayyu Mubarokatul Mar'ah Ramadhani. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa cara sosialisasi ke pemilih pemula agar menjadi pemilih cerdas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dilakukan dengan pendekatan ke anak muda. Pendekatannya, pertama mengobrol ringan terkait pemilu. Kemudian mengobrol mengenai pasangan calon. Bagaimanamenurut pemilih pemula dengan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kemudian Ayyu mengedukasi pemilih pemula berdasarkan obrolan ringan dan pertanyaan-pertanyaan dari pemilih pemula tersebut. Selain itu cara yang dilakukan oleh Ayyu ke pemilih pemula adalah dengan menyelipkan informasi tentang pemilu pada saat ada acara di karang taruna dan SMA. Edukasi tentang pemilu Ayyu sampaikan dalam waktu yang tidak lama, yang terpenting adalah pemilih pemula paham dan mau berpartisipasi untuk datang ke TPS pada saat hari pemungutan suara.

Pada dasarnya, sosialisasitatap muka yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pemilih pemula merupakan kegiatan yang penting dan bermanfaat khususnya untuk pemilih pemula itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam sosialisasi tatap muka, KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan materi tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan, ajakan untuk memilih dan gunakan hak pilih secara cerdas. Dari materi yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemilih pemilu terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Apalagi pemilih pemula merupakan pemilih yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Jadi sangat diperlukan informasi yang benar dan langsung diberikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Setelah materi disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, disinilah imitasi terjadi di kalangan

pemilih pemula. Pemilih pemula dapat meniru dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

#### **b. Election Camp**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan kegiatan *Election Camp* pada tanggal 14-16 Desember 2016 di Bumi Perkemahan Mandala Wangi Cibodas. Tujuan *Election Camp* adalah untuk memberikan edukasi kepada para pemilih pemula tentang pemilihan umum sehingga mereka dapat berpartisipasi secara cerdas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon mengatakan:

*“Election camp, awalnya ide kemping happy dengan cara mereka (pemilih pemula). Camping kan anak muda suka, tetapi menyisipkan berita-berita agar menggunakan hak pilih mereka, jadi tadinya ada anak yang buta politik, jadi tahu politik melalui election camp di kaki gunung Jawa Barat. Semuanya ada persyaratannya bisa mahasiswa atau SMA.”*

*Election camp* yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta merupakan kegiatan yang inovatif dan menarik untuk pemilih pemula. Pada umumnya pemilih pemula yang merupakan anak muda senang dengan kegiatan kemping. Dari kegiatan yang menyenangkan tersebut, pemilih pemula lebih mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Setelah menerima materi dengan cara yang menyenangkan, pemilih pemula akan meniru dan mengikuti apa yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

#### **c. Lomba Paduan Suara**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan Lomba Final Paduan Suara antar SMA se-Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 September 2016 bertempat di Theater Kecil Taman Ismail Marzuki. Acara ini diikuti oleh finalis Lomba Paduan Suara dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta yang telah diselenggarakan sebelumnya. Lagu yang dilombakan diantaranya *jingle* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, lagu perjuangan dan lagu daerah. Lomba Paduan Suara

diselenggarakan sebagai salah satu bentuk sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 melalui pendekatan seni bagi siswa-siswi SMA. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu Betty Epsilon mengatakan bahwa ternyata sosialisasi Pilgub yang menyasar pemilih pemula melalui cara budaya sangat mengasyikan. Sasaran tidak merasa terbebani dengan program ini, tapi pesan-pesan Pilgub dengan mudah diterima. Saya kira kegiatan seperti ini harus diperbanyak.<sup>11</sup>Selanjutnya Ibu Betty Epsilon mengatakan juga:

*“Inovasi kepada pemilih pemula adalah ketika sudah ada pemenang jingle dan maskot, tentu harus kami sosialisasikan, bagaimana cara sosialisasi ke anak muda. Sehingga nanti kata anak muda wah enak nih lagunya karena lagunya memang enak. Jadi kami lomba vocal group ke seluruh SMA di DKI Jakarta. Hampir terpapar 100 sekolah SMA se DKI Jakarta. Sekitar 2000 orang terlibat untuk nyanyi jingle. Alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi sekali. Awalnya kami menyisir dari tingkat Kabupaten/Kota. Dan yang hadir bukan hanya mereka yang nyanyi tetapi mereka yang nonton juga ngasih support.”*

## 2. Instruksi

Menurut Rush dan Althoff,<sup>12</sup> instruksi adalah peristiwa penjelasan diri, sungguhpun harus ditekankan bahwa hal itu tidak perlu hanya terbatas pada proses belajar formal saja. Seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang instruktif sifatnya. Misalnya dalam bermacam-macam tipe pendidikan kejuruan sambil bekerja (*type training vocational “on the job”*), dan beberapa diantaranya relevan dengan tingkah laku politik, sedangkan praktik dari beberapa organisasi atau kelompok-kelompok perorangan yang menjelma menjadi kelompok-kelompok diskusi merupakan tipe instruksi yang informal dan eksplisit sifatnya. Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, instruksi erat kaitannya dengan segmen penyandang disabilitas. Keterbatasan yang ada pada penyandang disabilitas menjadikan mereka harus mengikuti instruksi lebih detail yang disampaikan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta

---

<sup>11</sup>. [https://kpujakarta.go.id/view\\_berita/sman\\_78\\_juara\\_pertama\\_vocal\\_group\\_jingle\\_pilgub\\_dki\\_jakarta](https://kpujakarta.go.id/view_berita/sman_78_juara_pertama_vocal_group_jingle_pilgub_dki_jakarta).

<sup>12</sup>. Rush, Michael dan Phillip A. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h 38

sehingga mereka dapat menggunakan hak suaranya dengan benar pada saat hari pemungutan suara.

Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya pada saat hari pemungutan suara di TPS, tapi jauh-jauh hari sebelumnya terutama dalam hal akses informasi pemilu. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka ke segmen pemilih penyandang disabilitas sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Sosialisasi Tatap Muka kepada Segmen Penyandang Disabilitas**

No.	Tanggal	Tempat	Peserta
1	26 Agustus 2016	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Cengkareng	Tuna Laras
2	3 Februari 2017	Panti Bina Daksa Mandiri 01 Jakarta Timur	Tuna Daksa
3	4 Februari 2017	Panti Porturin Gor Atletik Rawamangun	Tuna Rungu dan Tuna Wicara
4	5 Februari 2017	Aula DPC Persatuan Tuna Netra Indonesia	Tuan Netra
5	8 Februari 2017	Bina Daksa Budi Bakti Cengkareng Jakarta Barat	Tuna Daksa

*Sumber: KPU DKI, 2018*

Sosialisasi tatap muka kepada segmen penyandang disabilitas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi panti sosial yang ada di Jakarta atau mengumpulkan penyandang disabilitas pada tempat yang telah ditentukan. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber berasal dari Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh pengurus panti yang lebih memahami kondisi penyandang disabilitas. Adapun materi yang disampaikan kepada segmen penyandang disabilitas adalah: tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, ajakan untuk memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, gunakan hak pilih secara cerdas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Tahun 2017. Dalam melakukan sosialisasi tatap muka kepada segmen penyandang disabilitas, KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu juga oleh relawan demokrasi. Peneliti telah melakukan wawancara dengan relawan demokrasi segmen penyandang disabilitas Jakarta Barat, Theresia Maryanti.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa cara sosialisasi kepada segmen penyandang disabilitas adalah tergantung dari *audiencenya*. Artinya tergantung dari jenis disabilitasnya. Yang lebih banyak dilakukan adalah metode praktik langsung sesuai dengan instruksi yang diberikan. Semua yang dilakukan harus praktik langsung. Harus ada surat suaranya. Cara mencoblos juga harus memakai benda *realnya*. Jadi tidak hanya sekedar bicara saja. Untuk tuna netra mereka harus tahu yang benar-benar nanti template untuk alat bantu pemungutan suara seperti apa, bagaimana cara melipat kertasnya. Untuk tuna daksa yang penting *realnya* seperti apa. Yang lebih fokus lagi adalah tuna grahita karena mereka juga punya hak pilih namun dengan karakteristik mereka. Kalau kotak suara di hari pemungutan suara ada 3, dalam acara sosialisasi juga harus *real* kotaknya ada 3. Untuk tuna rungu menggunakan bahasa isyarat.

Sosialisasi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta kepada penyandang disabilitas merupakan kegiatan yang penting dan bermanfaat khususnya untuk penyandang disabilitas itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam sosialisasi tatap muka, KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan materi tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan, ajakan untuk memilih dan gunakan hak pilih secara cerdas. Selain itu, KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan fasilitas dan kemudahan untuk penyandang disabilitas pada saat hari pemungutan suara. KPU Provinsi DKI Jakarta menyediakan template braile yang dapat digunakan untuk pemilih tuna netra. Di setiap TPS disediakan template braile berbentuk amplop. KPU Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan formulir C3 yaitu formulir pendampingan apabila pemilih disabilitas membutuhkan bantuan di dalam bilik suara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan Debat ke 3 putaran pertama pada tanggal 10 Februari 2017 yang disiarkan langsung oleh CNN Indonesia, Kompas TV, SCTV dan Jak TV. Tema debat adalah Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta dimana salah satu subtemanya adalah penyandang disabilitas. Pada segmen 3, terdapat pertanyaan dari panelis yang ada kaitannya dengan penyandang disabilitas. Dengan adanya subtema dan pertanyaan debat terkait penyandang disabilitas, penonton debat publik khususnya penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa dapat mempertimbangkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih berdasarkan jawaban-jawaban yang ada pada saat debat publik.

### 3. Motivasi

Menurut Rush dan Althof,<sup>13</sup> motivasi merupakan “tingkah laku yang tepat cocok” yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal (*trial and error*). Individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan-tindakan sama-cocok dengan sikap-sikap dan pendapat sendiri. Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Tahun 2017, motivasi erat kaitannya dengan segmen kelompok agama, segmen kelompok perempuan, segmen kelompok pinggiran (marginal), dan segmen kelompok profesi. Dimana segmen-segmen tersebut mempunyai pengalaman sebelumnya dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sehingga mereka akan lebih berhati-hati di dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Oleh karena itu KPU Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi politik kepada segmen-segmen tersebut agar memilih dengan cerdas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>. Rush, Michael dan Phillip A. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h 9



**a. Segmen Kelompok Agama**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka ke segmen kelompok agama berikut ini:

**Tabel 3**  
**Sosialisasi Tatap Muka kepada Segmen Kelompok Agama**

No	Tanggal	Tempat	Peserta
1	24 September 2016	Setu Babakan Srengseng Sawah	Guru Agama Se Provinsi DKI Jakarta
2	12 April 2017	Aula Masjid Istiqlal Jakarta Pusat	Tokoh Agama Islam dan Umat Islam
3	13 April 2017	Aula Gereja Katedral Jakarta	Tokoh Agama Kristen dan Umat Kristiani

*Sumber: KPU DKI, 2018*

Sosialisasi tatap muka kepada segmen kelompok agama dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan mengumpulkan tokoh agama dan jamaahnya pada tempat yang telah ditentukan. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber berasal dari Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan adanya isu SARA dan aksi umat Islam, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu Betty Epsilon mengatakan:

*“Sebenarnya kalau aksi umat itu tidak ada urusannya sama sekali dengan pencalonan dan atau dengan tahapan Pilgub DKI Jakarta. Bahwa itu adalah kondisi sosial yang terjadi di luar, yang dikaitkan dengan Pilgub DKI Jakarta. Tidak ada hubungan dengan kita, yang kita urus adalah calon, yang kita urus ada pemilih, yang kita urus adalah stakeholder terkait dengan pemilu. Aspirasi yang kemudian dikaitkan dengan Pilgubnya, padahal menurut kami berlima disini tidak ada hubungannya dengan kita, ketidaksukaan kepada Gubernur yang notabene-nya adalah salah satu calon. Dukung mendukung kepada calon yang agamanya sama. Itu situasi yang berbeda dengan situasi kami yang berbeda sebagai penyelenggara pemilu. Kalaupun itu dianggap “bermasalah”, itu bukan wilayah kami karena itu ada di kepolisian, karena itu bukan kampanye. Kampanye itu diartikan menawarkan visi misi yang dilakukan pasangan calon dan atau timnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Katakan misalkan ada calon atau timnya ingin melakukan kegiatan kampanye selambat-lambatnya harus lapor ke kita. Silakan kalau melakukan aksi sosial, artinya itu bukan ranahnya kami.”*

Dalam melakukan sosialisasi kepada segmen kelompok agama, KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh relawan demokrasi. Peneliti telah melakukan

wawancara dengan relawan demokrasi segmen kelompok agama Jakarta Utara Bapak Drs. Ahmad Sahal Malik. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Bapak Drs. Ahmad Sahal Malik melakukan sosialisasi melalui pengajian-pengajian ke majelis taklim khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan di masjid-masjid. Karena Bapak Drs. Ahmad Sahal beragama Islam, cara untuk sosialisasi kepada warga non muslim dilakukan melalui acara yang bersifat umum seperti pada saat pemilihan RT/RW.

#### **b. Segmen Kelompok Perempuan**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka dengan kelompok perempuan, ibu rumah tangga pada tanggal 30 Januari 2017 di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Sosialisasi tersebut dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten kepulauan Seribu Bapak Sumarno dan menghadirkan narasumber Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Ibu Betty Epsilon dan Bapak Fadlillah. Dalam melakukan sosialisasi kepada segmen kelompok perempuan, KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh relawan demokrasi segmen kelompok perempuan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan relawan demokrasi segmen kelompok perempuan Jakarta Pusat Ibu Anggraeni S.H. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sosialisasi kepada kelompok perempuan adalah sosialisasi dari organisasi tingkat wilayah yang lebih tinggi kemudian ke tingkat cabang sampai ke tingkat ranting. Setiap ada pertemuan tiap bulan, Ibu Anggraeni masuk ke pertemuan untuk mensosialisasikan terkait ajakan untuk memilih. Selanjutnya Ibu Angraeni melakukan sosialisasi di PKK. Ibu Anggraeni masuk ke kelurahan, meminta izin ke lurah untuk mensosialisasikan tentang pemilu. Tidak hanya tentang pemilu tetapi juga terkait perempuan dan politik. Ibu Anggraeni mengatakan bahwa masih banyak ibu-ibu PKK tingkat kelurahan, RT/RW yang alergi tentang politik. Jadi Ibu Anggraeni sedikit masuk pada materi tentang politik dan perempuan. Selanjutnya Ibu Anggraeni melakukan sosialisasi pada acara arisan dan menyampaikan tentang pentingnya untuk ikut

berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

**c. Kelompok Pinggiran (Marginal)**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka ke segmen kelompok pinggiran (marginal) berikut ini:

**Tabel 4**  
**Sosialisasi Tatap Muka kepada Segmen Kelompok Pinggiran (Marginal)**

No.	Tanggal	Tempat	Peserta
1	19 Oktober 2016	Rusun Marunda	Penghuni Rusun Marunda
2	2 November 2016	Kampung Nelayan Penjaringan Muara Baru Jakarta Utara	Nelayan
3	12 April 2017	Pinggir Rel Duri - Kampung Bandan	Warga Pinggir Rel
4	13 April 2017	Balai Warga RW 02 Angke Tambora Jakarta Barat	Warga Pinggir Rel
5	14 April 2017	Kel. Maphar, Taman Sari Jakarta Barat	Marginal
6	14 April 2017	Bantaran Rel Manggarai	Warga Bantaran Rel Manggarai

*Sumber: KPU DKI, 2018*

Sosialisasi tatap muka kepada segmen kelompok pinggiran (marginal) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangi tempat kelompok pinggiran dan mengumpulkan kelompok pinggiran pada tempat yang telah ditentukan. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber berasal dari Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam melakukan sosialisasi kepada segmen kelompok pinggiran, KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh relawan demokrasi. Peneliti telah melakukan wawancara dengan relawan demokrasi segmen kelompok pinggiran Kepulauan Seribu, Bapak Saiman. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa cara sosialisasi kepada nelayan dilakukan dengan keliling pulau menggunakan pengeras suara. Kemudian mendatangi langsung ketika para

nelayan berkumpul. Tidak mengumpulkan nelayan pada tempat dan waktu tertentu karena nelayan harus mencari ikan.

#### **d. Segmen Kelompok Profesi**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka kepada segmen kelompok profesi pada tanggal 24 Desember 2016 di Yayasan Uswatun Hasanah Cengkareng Jakarta Barat dengan mengundang masyarakat pekerja dengan profesi sebagai tukang urut, seniman, karyawan swasta dan lain-lain. Dalam sosialisasi tersebut, narasumber berasal dari Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam melakukan sosialisasi kepada segmen kelompok profesi, KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu juga oleh relawan demokrasi. Peneliti telah melakukan wawancara dengan relawan demokrasi segmen kelompok profesi Jakarta Barat, Akbar. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Akbar melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan orang-orang yang berprofesi sebagai karyawan. Tidak dengan mendatangi kantor-kantor agar tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan perlu izin terlebih dahulu untuk masuk ke perkantoran.

#### **D. KESIMPULAN**

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam membentuk pemilih cerdas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 adalah dengan metode imitasi, instruksi dan motivasi. Imitasi kepada pemilih pemula dilakukan sosialisasi tatap muka, *election camp*, lomba paduan suara. Instruksi dilakukan kepada penyandang disabilitas dengan cara dengan cara sosialisasi tatap muka, debat publik ke 3 putaran pertama. Motivasi dilakukan kepada segmen kelompok agama, segmen kelompok perempuan, segmen kelompok pinggiran (marginal), dan segmen kelompok profesi dengan cara sosialisasi tatap muka, debat publik ke 3 putaran

pertama dimana pada segmen 3, terdapat pertanyaan dari panelis yang ada kaitannya dengan perempuan, debat publik putaran kedua dimana terdapat pertanyaan yang berasal dari perwakilan komunitas. Diantaranya adalah pertanyaan dari perwakilan komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga dan komunitas nelayan yang merupakan bagian dari kelompok pinggiran (marginal).

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuyandi, Yusa. (2014). *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara.
- Dumanig, F. (2014). Social Capital and Politeness Strategies in Fostering Ethnic Relations in Malaysia and Philippines. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 23-38.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/29/16532251/gnpf.mui.perkiraan.3.juta.orang.ikut.dalam.aksi.2.desember>. Diakses pada 29/12/2017
- [http://www.kpu.go.id/koleksigambar/PETA\\_AMJ.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/PETA_AMJ.pdf) diakses pada 03/06/2017
- [https://kpujakarta.go.id/viewberita/sman\\_78\\_juara\\_pertama\\_vocal\\_group\\_jingle\\_pilgub\\_dki\\_jakarta](https://kpujakarta.go.id/viewberita/sman_78_juara_pertama_vocal_group_jingle_pilgub_dki_jakarta) diakses pada 12/02/2018
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-panjang-kasus-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok.html> diakses pada 24/12/2017
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Morgan, J. (2014). Americanizing Islam as the Price of Assimilation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 1-16.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.

- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima'i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Ramadhan, Sahrani H. (2004). *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu 2004*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Rush, Michael dan Phillip A. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-30.
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tsai, K. (2014). A Journey to the Qualitative Wonderland: Lessons Learned for Novice Researchers. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 39-50.
- Zuhri, Sihabudin. (2010). *Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.